



Dampak Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Yayasan

Putri Indi Odivia¹, Asti Irawati², Putri³, Apolonia Emrianti Meo⁴, Fadhilah⁵, Muhammad Din⁶, Betty⁷
^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2025
Revised Desember 10, 2025
Accepted Desember 18, 2025

Kata Kunci:

ISAK 335,
PSAK 45,
Pelaporan Keuangan,
Transparansi,
organisasi nirlaba

Keywords:

Isak 335,
Psak 45,
Financial Reporting,
Transparency,
Non-Profit Organizations

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transisi pelaporan keuangan organisasi nirlaba dari PSAK 45 menuju ISAK 35/ISAK 335, menilai dampaknya terhadap transparansi, serta mengidentifikasi kendala implementasinya dengan tujuan mewujudkan pelaporan keuangan yayasan yang lebih akuntabel dan konsisten. Penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan *narrative review* berdasarkan jurnal ilmiah, buku, standar akuntansi, dan laporan organisasi yang dikelompokkan ke dalam tema regulasi, laporan keuangan, akuntabilitas, serta tantangan implementasi. Hasil kajian mendalam menunjukkan bahwa PSAK 45 memiliki beberapa kelemahan signifikan, sementara ISAK 335 mampu meningkatkan konsistensi penyajian laporan dan menyederhanakan klasifikasi aset neto secara lebih baik. Namun, meskipun standar baru ini berpotensi memperkuat transparansi, penerapannya masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang sederhana, khususnya pada yayasan berskala kecil. Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi empiris ISAK 335 serta kebutuhan model pelaporan yang lebih praktis bagi organisasi nirlaba kecil, sehingga pendampingan, pelatihan, dan panduan operasional sangat diperlukan agar manfaat standar baru ini dapat dioptimalkan.

ABSTRACT

This research analyzes the transition of non-profit organization financial reporting from PSAK 45 to ISAK 35/ISAK 335, assesses its impact on transparency, and identifies implementation constraints with the aim of achieving more accountable and consistent financial reporting for foundations. The study employs a literature review using a narrative review approach based on scientific journals, books, accounting standards, and organizational reports grouped into themes of regulation, financial statements, accountability, and implementation challenges. The in-depth review results indicate that PSAK 45 has several significant weaknesses, while ISAK 335 is capable of improving consistency in presentation and simplifying net asset classification more effectively. However, although this new standard potentially strengthens transparency, its application is still constrained by limited human resources and simple recording systems, particularly in small-scale foundations. Furthermore, there is a research gap related to the empirical implementation of ISAK 335 and the need for more practical reporting models for small non-profit organizations; thus, mentoring, training, and operational guidelines are highly necessary to optimize the benefits of this new standard.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Putri Indi Odivia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
Palu, Indonesia
Email: putriindi758@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Entitas nirlaba seperti yayasan memiliki peran penting dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan [1]. Tidak seperti entitas bisnis yang berorientasi profit, organisasi nirlaba berfokus pada pelayanan masyarakat [2]. Meski demikian, organisasi nirlaba tetap dituntut untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber dayanya secara akurat, terutama karena pendanaan umumnya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan [3]. Untuk menjaga kepercayaan publik dan donatur, penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mendasar [4].

Dinamika pelaporan keuangan entitas nirlaba di Indonesia mengalami pergeseran signifikan terkait standar yang digunakan. Sejak tahun 1997, organisasi nirlaba mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 [2]. Namun, standar ini kemudian dicabut melalui PPSAK 13 dan digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 [1]. Perubahan ini menegaskan bahwa entitas nirlaba harus menerapkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dengan penyesuaian deskripsi akun sesuai ISAK 35. Lebih lanjut, sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada tahun 2022, terjadi perubahan penomoran standar di mana ISAK 35 berubah menjadi ISAK 335 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Perubahan penomoran ini bertujuan untuk membedakan standar yang merujuk pada IFRS (*IFRS Accounting Standards*) dan yang tidak.

Meskipun standar telah berevolusi, masalah utama di lapangan menunjukkan bahwa banyak yayasan dan organisasi nirlaba belum memahami atau menerapkan standar baru tersebut [5]. Banyak entitas nirlaba masih menyajikan laporan keuangan secara manual dan sederhana, seringkali hanya terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar [1]. Kendala ini sering disebabkan oleh minimnya latar belakang pengetahuan akuntansi para pengelola yayasan.

Dampak dari perubahan standar ini sangat signifikan terhadap aspek akuntabilitas. Penerapan ISAK 35 (dan selanjutnya ISAK 335) menuntut penyajian komponen laporan yang lengkap, termasuk laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan [1]. Penerapan standar ini terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yayasan, serta mempermudah audit eksternal [6]. Sebaliknya, ketidakmampuan menerapkan standar ini dapat mempersulit pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kinerja manajemen oleh para pemangku kepentingan [1].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) dengan mengacu pada sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks akuntansi, standar akuntansi, dan laporan organisasi yang tersedia secara publik. Pendekatan yang digunakan adalah *narrative review*, yaitu teknik penelaahan literatur secara mendalam untuk memahami perubahan kerangka pelaporan keuangan entitas nirlaba setelah pencabutan PSAK 45 dan implementasi ISAK 335. Metode ini dipilih karena topik penelitian mengenai perubahan standar akuntansi membutuhkan analisis konseptual yang bersumber pada regulasi, teori, dan temuan penelitian sebelumnya.

Proses analisis dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama, seluruh literatur yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu aspek regulasi, penyajian laporan keuangan, akuntabilitas

entitas nirlaba, serta tantangan implementasi ISAK 335. Pengelompokan ini memudahkan penataan informasi secara sistematis dan membantu mengidentifikasi perkembangan konsep dalam pelaporan keuangan nirlaba. Tahap kedua, dilakukan perbandingan antar temuan untuk melihat konsistensi, perbedaan, dan perkembangan pemikiran mengenai implikasi pencabutan PSAK 45 serta penerapan ISAK 335. Melalui tahapan ini, penelitian menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai dampak perubahan standar terhadap akuntabilitas yayasan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Entitas Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan entitas yang tujuan utamanya bukan menghasilkan laba, melainkan menyediakan layanan sosial bagi masyarakat. Sumber pendanaan umumnya berasal dari sumbangan tanpa tuntutan imbalan, sehingga setiap kelebihan pendapatan digunakan kembali untuk operasional organisasi, bukan untuk dibagikan kepada pendiri ataupun pengurus [1]. Karakteristik ini membedakan entitas nirlaba dengan entitas berorientasi laba, terutama dalam hal struktur kepemilikan dan sumber pendanaan. ISAK 35 menegaskan bahwa pendanaan entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan manfaat ekonomis sepadan [4].

2.1.2 Evolusi Standar Pelaporan Keuangan

1. PSAK 45

Penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba Indonesia awalnya diatur menggunakan PSAK 45. Adanya PSAK 45 ini diharapkan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia seragam. Selain itu adanya PSAK 45 untuk mengatur penyajian laporan keuangan nirlaba agar akuntabel dan transparan bagi penggunanya, yaitu pihak berkepentingan agar dapat melihat aktivitas dan program yang sudah dilakukan oleh organisasi tersebut dan anggaran yang digunakan dari para donatur dapat dipertanggungjawabkan [1]. Terjadinya peralihan PSAK 45 ke ISAK 35 dikarenakan IAI menilai bahwa tidak perlu adanya standar khusus untuk mengatur laporan keuangan entitas nirlaba karena sudah ada PSAK 1 yang mencakupnya, sehingga tidak perlu adanya dua PSAK yang mengatur hal yang sama, banyak yang mengira PSAK 1 hanya untuk entitas laba padahal nirlaba juga sudah masuk didalamnya hanya perlu penyesuaian deskripsi untuk beberapa pos. Dibuatlah ISAK 35 untuk paduan penjelasan penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba. Pada prakteknya ISAK 35 memudahkan entitas berorientasi nirlaba dalam penyajian laporan keuangannya karena penyesuaian deskripsi atas laporan keuangan seperti judul laporan keuangan tidak dibatasi, lain halnya dengan PSAK 45 yang cenderung berpedoman pada aturan yang berlaku secara umum [7].

2. Pencabutan PSAK 45

DSAK IAI menerbitkan ISAK dibandingkan dengan PSAK yaitu karena DSAK IAI menganggap bahwa aturan mengenai penyajian laporan keuangan nirlaba telah diatur dalam PSAK 1 paragraf 05 yang bunyinya “ Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas non laba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam sendiri” sehingga secara substansial PSAK 1 telah mencakup untuk penyajian laporan keuangan entitas nirlaba namun memang hanya diperlukan sedikit penyesuaian sehingga tidak diperlukan adanya dua peraturan yang mengatur hal yang sama [7]. SAK Indonesia melakukan penyesuaian ke IFRS menyebabkan SAK berbasis industri dicabut dikarenakan SAK berbasis IFRS menganut prinsip “*transaction based*” atau berbasis transaksi bukan “*entity based*” atau berbasis jenis entitas sehingga seluruh SAK yang mengatur khusus entitas dicabut karena sudah diatur oleh SAK induk seperti SAK, SAK ETAP, atau SAK EMKM. Termasuk PSAK 45 juga dicabut. Pencabutannya melalui PPSAK No. 13 pada tanggal 26 September 2018 diterbitkan draf

eksposur awal, kemudian 31 Desember 2019 dilakukan public hearing, 11 April 2019 PPSAK 13 disahkan oleh DSAK-IAI dan efektif berlaku 1 Januari 2020 sehingga PSAK 45 resmi tidak boleh dipakai lagi bersamaan dengan itu ISAK 35 diterbitkan, disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan diterapkan mulai 1 Januari 2020 [7].

3. Penerapan PSAK 1 untuk entitas nirlaba

PSAK 1 mengatur penyajian laporan keuangan secara umum tetapi tidak menyediakan aturan secara spesifik bagi entitas nirlaba untuk membuat laporan keuangannya. Oleh karena itu, dibuatlah ISAK 35 untuk memberikan paduan khusus terhadap entitas nirlaba untuk menyusun laporan keuangan dengan benar [4]. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) merupakan interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05. ISAK 35 ini hanya digunakan untuk mengatur penyajian laporan keuangan entitas nirlaba mulai dari persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba di luar daripada itu entitas nirlaba dapat mengacu pada Standar Akuntansi Syariah (SAS), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau peraturan lain yang relevan [9].

4. ISAK 335 sebagai standar terbaru entitas nonlaba

Menurut (IAI., 2025) ISAK 335 merupakan peraturan penyajian laporan keuangan berorientasi non laba yang sebelumnya adalah ISAK 35 yang juga menggantikan PSAK 45. Sedangkan untuk aspek lain diluar dari penyajian laporan keuangan entitas non laba menerapkan persyaratan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan atas suatu transaksi atau kejadian dalam standar pelaporan keuangan yang digunakannya, seperti SAK Indonesia dan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

ISAK 335 menetapkan lima komponen utama laporan keuangan entitas nirlaba [3], yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan – menyajikan aset, liabilitas, dan aset neto.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif – menggambarkan kinerja keuangan selama periode pelaporan.
3. Laporan Arus Kas – menyajikan arus kas operasi, investasi, dan pendanaan.
4. Laporan Perubahan Aset Neto – menunjukkan perubahan aset neto.
5. Catatan atas Laporan Keuangan – memberikan penjelasan tambahan atas informasi yang disajikan.

ISAK 335 membagi aset neto menjadi dua kategori utama, yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan, untuk mencerminkan pembatasan penggunaan dana oleh pemberi sumber daya [5]. Pengelompokan ini penting untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana dan memudahkan pemangku kepentingan menilai kepatuhan terhadap tujuan donasi.

2.1.3 Konsep Akuntabilitas Yayasan

Akuntabilitas dalam entitas nirlaba mencerminkan kemampuan organisasi menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas berarti kesiapan entitas memberikan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan serta kegiatan yang telah dilaksanakan [3]. Selain akuntabilitas keuangan, entitas nirlaba juga wajib memenuhi akuntabilitas publik, yaitu kewajiban moral dan legal untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan (Syahrudin Rasul, 2002 dalam [6]).

Transparansi menjadi bagian penting dari akuntabilitas, terutama karena pendanaan yayasan berasal dari donatur, wakaf, dan sumbangan publik. Pelaporan keuangan yang terbuka memungkinkan donatur menilai apakah sumber daya digunakan sesuai tujuan organisasi. Keterbukaan tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Temuan mengenai kelemahan PSAK 45

3.1.1 Tidak mengikuti perkembangan IFRS

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa PSAK 45 semakin tertinggal karena tidak mengalami penyesuaian seiring perkembangan IFRS yang menekankan transparansi, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan [7]. Ketidaksesuaian tersebut terutama tampak pada struktur laporan dan prinsip pelaporan yang kurang fleksibel, sehingga tidak lagi mencerminkan kebutuhan pelaporan organisasi nirlaba modern. Selain itu, praktik organisasi nirlaba yang semakin kompleks menuntut penyajian laporan keuangan lintas batas negara untuk kepentingan donor dan regulator. PSAK 45 tidak didesain mengikuti tren konvergensi IFRS tersebut, sehingga banyak penelitian menyimpulkan bahwa standar ini tidak lagi memadai sebagai dasar pelaporan kontemporer dan menjadi alasan utama diterbitkannya ISAK 35 sebagai interpretasi PSAK 1 [8].

3.1.2 Tidak seragam dengan standar sektor privat lain

Ketidaksinkronan PSAK 45 dengan PSAK 1 menjadi kelemahan struktural utama. PSAK 45 menggunakan format laporan berbeda, misalnya Laporan Aktivitas menggantikan Laporan Laba Rugi, yang menyebabkan laporan nirlaba sulit dibandingkan dengan entitas berorientasi laba [7]. Selain itu, pengelompokan aset neto ke dalam tiga kategori (tidak terikat, terikat sementara, terikat permanen) tidak ditemukan dalam standar sektor privat, sehingga mengurangi keterbandingan antar-laporan [4]. Kekurangan lainnya adalah variasi praktik pelaporan di lapangan akibat minimnya panduan detail, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus entitas nirlaba yang masih menggunakan basis kas sehingga laporan keuangannya tidak lengkap dan tidak merepresentasikan kondisi secara andal [10].

3.1.3 Tidak Mencerminkan Kebutuhan Pelaporan Modern Yayasan

Literatur juga menegaskan bahwa PSAK 45 tidak lagi mencukupi untuk menjawab kebutuhan organisasi nirlaba modern yang menuntut transparansi lebih tinggi, tata kelola lebih kuat, dan pelaporan yang ringkas serta informatif [1]. Seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas yayasan dan tuntutan pengungkapan dari donor serta masyarakat, PSAK 45 dipandang tidak mampu menyediakan kerangka pelaporan yang relevan, terutama karena tidak mengikuti perkembangan praktik pelaporan internasional [7]. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa PSAK 45 perlu digantikan oleh standar yang lebih adaptif dan terintegrasi dengan struktur pelaporan global, yang kemudian diwujudkan melalui penerbitan ISAK 35 oleh DSAK IAI [9].

3.2 Temuan mengenai keunggulan & perubahan dari ISAK 335

3.2.1 Penyajian lebih seragam dengan PSAK 1

ISAK 335 memberikan harmonisasi signifikan dengan PSAK 1 karena mengadopsi struktur laporan yang sama sehingga meningkatkan konsistensi penyajian dan memudahkan pengguna laporan, termasuk auditor, donatur, dan regulator [7]. Penelitian menunjukkan bahwa keselarasan ini meningkatkan keterbandingan laporan nirlaba dengan entitas lain dan memperkuat kredibilitas informasi keuangan [8].

3.2.2 Penekanan pada klasifikasi aset neto

ISAK 335 menyederhanakan klasifikasi aset neto menjadi dua kategori: dengan pembatasan dan tanpa pembatasan, menggantikan tiga kategori pada PSAK 45. Penyederhanaan ini memudahkan organisasi mengidentifikasi, memantau, dan melaporkan penggunaan dana sesuai ketentuan donor [5]. Model ini juga lebih sejalan dengan praktik internasional, sehingga meningkatkan kejelasan informasi bagi pemangku kepentingan.

3.2.3 Peningkatan kualitas catatan laporan keuangan

Studi menunjukkan bahwa ISAK 335 mendorong penguatan pengungkapan pada CALK, terutama terkait sumber pendanaan, batasan donatur, kebijakan akuntansi, serta rincian perubahan aset neto [8]. Peningkatan ini dinilai mampu memperbaiki akuntabilitas yayasan di mata donatur dan publik karena informasi yang diberikan lebih lengkap dan relevan [3].

3.2.4 Memberi Fleksibilitas Lebih Baik untuk Yayasan Multisumber Dana

Literatur juga menyoroti fleksibilitas ISAK 335 dalam memfasilitasi yayasan yang mengelola banyak sumber pendanaan, misalnya hibah pemerintah, donasi individu, maupun kontribusi lembaga internasional [5]. Dengan klasifikasi aset neto yang sederhana dan konsisten, organisasi dapat menyusun laporan keuangan secara sistematis tanpa memecah laporan berdasarkan sumber dana secara berlebihan. Pendekatan ini menekan risiko redundansi informasi dan tetap menjaga transparansi melalui CALK yang lebih informatif [4].

3.2.5 Dampak terhadap Akuntabilitas Yayasan

Perubahan dari PSAK 45 ke PSAK 1 dan ISAK 335 membawa pengaruh langsung terhadap bagaimana yayasan mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya. Format pelaporan yang kini lebih terstruktur membuat informasi keuangan tersaji dengan lebih jelas, terutama terkait klasifikasi aset neto dan alur penggunaan dana. Hal ini meningkatkan transparansi karena pemangku kepentingan dapat melihat sumber, pembatasan, dan pemakaiannya secara lebih eksplisit.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya kemudahan bagi pembaca laporan, termasuk donatur dan masyarakat dalam menilai apakah dana digunakan sesuai amanat. Penyajian laporan aktivitas dan catatan yang lebih komprehensif membantu menampilkan gambaran kinerja yayasan secara utuh.

Namun, perubahan standar ini juga menghadirkan tantangan signifikan. Banyak SDM akuntansi yayasan belum familiar dengan konsep PSAK 1 maupun pengaturan aset neto dalam ISAK 335, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Yayasan berskala kecil menghadapi tekanan lebih besar karena umumnya belum memiliki sistem pencatatan yang memadai dan kesulitan menyusun catatan atas laporan keuangan yang sesuai standar.

Secara keseluruhan, perubahan standar meningkatkan potensi akuntabilitas, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan kompetensi dan infrastruktur akuntansi di masing-masing yayasan.

3.2.6 Gap Penelitian

Kajian literatur menunjukkan bahwa perubahan standar dari PSAK 45 menuju PSAK 1 dan ISAK 335 belum banyak diteliti secara mendalam pada konteks praktik di lapangan. Sebagian besar publikasi masih berfokus pada aspek konseptual atau penjelasan normatif standar, sehingga evaluasi nyata mengenai penerapan ISAK 335 oleh yayasan masih sangat terbatas. Kondisi ini meninggalkan celah penting untuk mengamati bagaimana standar baru diterjemahkan dalam praktik dan apakah yayasan mampu memenuhi tuntutan penyajian yang lebih kompleks.

Selain itu, belum banyak penelitian yang menilai efektivitas ISAK 335 dalam memperkuat akuntabilitas. Meski standar ini dirancang untuk meningkatkan transparansi melalui penyajian aset neto dan catatan keuangan yang lebih komprehensif, bukti empiris mengenai seberapa jauh hal tersebut benar-benar terjadi masih minim. Penilaian bahwa standar baru otomatis meningkatkan akuntabilitas perlu diuji secara kritis.

Gap lainnya adalah ketiadaan model atau panduan pelaporan keuangan yang ramah bagi yayasan berskala kecil. Literatur menunjukkan bahwa yayasan kecil menghadapi keterbatasan SDM dan sistem akuntansi, tetapi belum ada penelitian yang menawarkan pendekatan pelaporan adaptif yang tetap sesuai dengan ISAK 335. Kebutuhan inilah yang membuka ruang penelitian untuk merumuskan model pelaporan sederhana namun tetap memenuhi standar yang berlaku.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Analisis Hubungan Perubahan Standar dengan Akuntabilitas

Penerapan ISAK 335 secara konsep dirancang untuk meningkatkan transparansi melalui penggunaan PSAK 1 dan penekanan pada penyajian aset neto. Meskipun demikian, peningkatan akuntabilitas tidak terjadi secara otomatis. Pada banyak yayasan dengan keterbatasan sumber daya manusia, penyusunan laporan keuangan masih dilakukan sebatas memenuhi formalitas sehingga kualitas informasi belum meningkat secara signifikan. Klasifikasi aset neto terikat dan tidak terikat sebenarnya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah penggunaan dana. Namun, istilah tersebut belum familiar bagi sebagian besar publik maupun pengelola yayasan. Akibatnya, efektivitas penyampaian informasi tetap sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman akuntansi di masing-masing yayasan.

3.3.2 Perbandingan Literatur

Literatur akademik umumnya menunjukkan bahwa ISAK 335, melalui penggunaan PSAK 1, menghasilkan pelaporan keuangan yayasan yang lebih konsisten dan sebanding dengan entitas lain. Dengan demikian, standar ini dipandang sebagai penyempurnaan dari PSAK 45. Di sisi lain, terdapat studi lapangan yang mengungkapkan kendala khusus bagi yayasan kecil. Kewajiban untuk mengklasifikasikan aset neto dan menyusun catatan keuangan yang lebih rinci dianggap menambah beban administratif. Kendala ini muncul terutama pada yayasan yang memiliki keterbatasan SDM dan tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai.

Kontradiksi temuan dalam literatur terutama disebabkan oleh perbedaan konteks penelitian. Studi teoretis menilai standar dari sisi kualitas informasi dan kesesuaian konsep, sedangkan kajian praktik lebih menyoroti kapasitas lapangan. Dengan demikian, meskipun perubahan standar membawa manfaat secara normatif, implementasinya tidak berjalan seragam.

3.3.3 Implikasi Praktis bagi Yayasan

Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan ISAK 335. Banyak yayasan tidak memiliki staf akuntansi yang kompeten, sehingga risiko penerapan yang tidak tepat cukup besar. Selain itu, standar ini menuntut dokumentasi dan sistem akuntansi yang lebih terstruktur. Yayasan perlu memperbaiki alur pencatatan, penyimpanan dokumen, serta mekanisme pelaporan agar dapat memenuhi ketentuan ISAK 335. Untuk mendukung proses tersebut, pelatihan mengenai penyajian laporan berbasis PSAK 1 dan pemahaman mengenai klasifikasi aset neto menjadi kebutuhan penting. Tanpa peningkatan kapasitas, penerapan standar cenderung tidak optimal.

3.3.4 Posisi Penulis

ISAK 335 dapat dipandang sebagai langkah maju karena membawa pelaporan yayasan ke dalam kerangka pelaporan umum. Standar ini mendorong keterbukaan informasi dan memberikan struktur yang mempermudah evaluasi penggunaan dana. Namun, bagi yayasan berskala kecil, perubahan standar dapat menjadi tantangan. Keterbatasan SDM, infrastruktur, dan pemahaman akuntansi menyebabkan proses penerapan menjadi lebih rumit tanpa adanya pendampingan atau pelatihan yang memadai. Secara kritis, ISAK 335 merupakan kemajuan pada tingkat konsep, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada kapasitas internal yayasan. Idealnya, standar ini memberikan peningkatan kualitas pelaporan, namun dalam praktiknya diperlukan penyesuaian dan penguatan kompetensi agar dampak positifnya benar-benar terwujud.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur, diperlukan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan implementasi ini. Bagi pengelola yayasan, pelatihan intensif mengenai teknis penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 335 dan penggunaan software akuntansi sederhana sangat disarankan untuk meminimalkan kesalahan pencatatan. Bagi regulator dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sosialisasi yang lebih masif mengenai perubahan penomoran ke ISAK 335 serta penyediaan panduan teknis yang lebih praktis bagi entitas nirlaba berskala kecil sangat diperlukan. Sinergi antara peningkatan kompetensi SDM dan dukungan regulasi akan memastikan bahwa perubahan standar ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar meningkatkan akuntabilitas sektor nirlaba di Indonesia.

Pelaporan keuangan entitas nirlaba di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, dimulai dari pencabutan PSAK 45 yang dinilai usang dan kurang adaptif menuju implementasi PSAK 1 yang disesuaikan melalui ISAK 35, yang kemudian dinomori ulang menjadi ISAK 335 efektif per 1 Januari 2024. Pergeseran ini dilakukan sebagai bentuk harmonisasi dengan kerangka pelaporan berbasis prinsip dan praktik internasional yang menuntut transparansi serta konsistensi penyajian informasi keuangan.

Secara konseptual, ISAK 335 membawa kemajuan substansial bagi pelaporan keuangan nirlaba. Standar ini mendorong transparansi melalui penyeragaman format laporan keuangan dengan PSAK 1 dan penyederhanaan klasifikasi aset neto menjadi dua kategori, yaitu “dengan pembatasan” dan “tanpa pembatasan”. Selain itu, ISAK 335 mewajibkan penyajian lima komponen laporan keuangan secara lengkap, yang dapat meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan pemangku kepentingan dalam menilai pengelolaan dan penggunaan dana donatur.

Meskipun demikian, peningkatan akuntabilitas yang diharapkan tidak terjadi secara otomatis. Implementasi ISAK 335 di lapangan masih menghadapi tantangan serius, terutama pada yayasan berskala kecil yang umumnya memiliki keterbatasan SDM akuntansi dan belum didukung sistem pencatatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penerapan standar baru sering kali belum optimal. Selain itu, penelitian empiris mengenai efektivitas penerapan ISAK 335 masih terbatas, sehingga kesenjangan pemahaman terkait dampak nyata standar ini dalam praktik masih perlu dijembatani melalui studi lebih lanjut.

REFERENSI

- [1] Anand, D. (2018). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Berdasarkan PSAK 45. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 161–176. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1745>
- [2] Astriani, M., & Heriyanto. (2025). Analisis Penerapan Isak 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Nonlaba (Studi Kasus pada Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(2), 1068–1074. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3970>
- [3] Dariri, F., & Djalaluddin, A. (2025). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA*, 9(3), 776–792.
- [4] Diviana, S., Ananto, R. putra, Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 114–131. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>
- [5] Irpan, Ridho, M., Fazrin, I., & Ruhiyat, E. (2025). Penerapan ISAK 335 oleh Non-Governmental Organization (NGO) di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024. *Journal of Inovative and Creativity*, 5(2), 9701–9716.
- [6] Maulidiyah, N., & Darno. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Di Yayasan Sosial Keagamaan. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(1), 1–8. DOI: 10.31334/neraca.v1i1.642

- [7] Nisa, S., Malia, E., & Baihaki, A. (2023). Perbandingan Kompleksitas Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Menggunakan PSAK 45 Dibandingkan ISAK 35. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 4(2), 47–56. <https://doi.org/10.24929/jafis.v4i2.2966>
- [8] Setiadi, Safri, & Asak, P. R. A. (2025). Penerapan Perubahan ISAK 35 ke 335 Sesuai IFRS pada Organisasi Nirlaba di Kota Bekasi, Jawa Barat. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 10(1), 20–25. <https://doi.org/10.35968/jbau.v10i1.1425>
- [9] Shoimah, I., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 243–259.
- [10] Wirakrama, G. A. W., Aspirandi, R. M., & Afroh, I. K. F. (2023). Analisis Penerapan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Jember Berbagi Berkah Bersama. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 114–126.